



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 4 /2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Barito Utara;
13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara;
14. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
15. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Bupati Barito Utara.

b. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

7. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
 3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 4. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
 5. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 6. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Barito Utara;
 7. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Barito Utara;
 8. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan
 9. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
 2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum; dan
 5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.
- e. Bendahara Penerimaan :
1. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
 2. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Barito Utara;
 3. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD);
 4. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
 5. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati Barito Utara

melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Dengan mulai berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/592/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
5. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 9 /2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	DADANG KARIYADI NIP. 19821211 200901 1 005 Pengatur (II/c)		
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	RANDI PERDANA PUTRA, A.Md.,Far NIP. 19900202 201101 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	ULYA ULFAH, A.Md.AK NIP. 19930131 201503 2 003 Penata Muda (III/a)	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LINA RAHMAWATI NIP. 19770827 200701 2 006 Pengatur TK.I (II/d)	NUR ARIFIN, SE NIP. 19820208 200901 1 004 Penata Muda (III/a)	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PURWANTI, SE NIP. 198208102011012008 Penata Muda (III/a)		
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ISNANIAH, SE NIP. 19730226 200704 2 006 Penata (III/c)		
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	ARBIANTO WAHYU SAPUTRA, SE NIP. 19930805 202203 1 001 Penata Muda (III/a)		

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SLAMET SUWITO NIP. 19781223 200801 1 010 Pengatur TK.I (II/d)		
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DWI NOOR RAMADIANI, SE NIP. 19840617 200901 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)		
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	FERANEIS PRATIWI HOSANG, ST. NIP. 19860227 201001 2 026 Penata Tk. I (III/d)		
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	FENY YULIANTI NIP. 19780211 200801 2 016 Pengatur Tk. I (II/d)	ANDRIAN SAPUTRA NIP. 19790729 200701 1 009 Pengatur Tk. I (II/d)	
11	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ISNA ANITA, S.Pd.I NIP. 19760701 200701 2 018 Pengatur Tk. I (II/d)	JULIANA, A.Md.AK NIP. 19880730 201001 2 013 Penata Muda Tk. I (III/b)	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SURIANSYAH NIP. 19780427 200801 020 Pengatur Tk. I (II/d)		
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ASWATUN NIKMAH, SE NIP. 19911206 201503 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)		
14	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	HENDRI YUNATAN NIP. 19860418 201001 1 003 Pengatur Tk. I (II/d)	FIA RAHMAWATI, A.Md. NIP. 19910604 201503 2 006 Pengatur Tk. I (II/d)	
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	AHMAD SUGARA NIP. 19800729 201406 1 004 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	UMMI NORNIATI, SE.M.IP. NIP. 19800103 200003 2 002 Penata (III/c)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DHANANG TULUS WICAKSONO, S.T NIP. 19810303 201403 1 001 Penata (III/c)	FITRIYANTI, SE NIP. 197412161994032003 Penata Tk. I (III/d)	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	BUDIKAMNUR, A.Md NIP. 19810326 200901 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)		
18	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	NORMILISMIATI, S.Pd.I NIP. 19660725 199203 2 007 Penata Tk. I (III/d)	YAYU DAHLIANA, S.AP NIP. 19790913 200901 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	
19	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	RIJALI FADLI NIP. 19800730 200003 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	FITRIADI FAHMI NIP. 19840627 201001 1 011 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	NOOR HARTINI, SE NIP. 19820115 201001 2 012 Penata (III/c)	KORNELIUS NIP. 19771007 200701 1 013 Pengatur (II/c)	
21	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	FERRY RAMADANI NIP. 19850602 200604 1 003 Pengatur Tk. I (II/d)	ANGGARAINI NIP. 19740217 200701 2 006 Pengatur (II/c)	
22	Inspektorat	Inspektur Inspektorat	DWI ARIANIE J, S. AP NIP. 19830818 200901 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah	SUMARNO, A.Md. NIP. 19811220 200801 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b)		
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	FAISAL RAHMAN NIP. 19800309 200501 1 005 Penata Muda (III/a)		

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	HARLINA RAHMAYANTI, A.Ma NIP. 19830119 201001 2 001 Penata Muda (III/a)	YUSNITHA YULIANSYAH MASIR NIP. 19771121 200701 2 010 Pengatur Tk. I (II/d)	
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	NURYANI, SE.,M.IP NIP. 19861011 200604 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)		
27	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	DINI MARDIATI, A.Md NIP. 19830718 201503 2 004 Pengatur Tk. I (II/d)		
28	Kecamatan Teweh Tengah	Camat Kecamatan Teweh Tengah	AGUS SARWO BUDIONO NIP. 19760215 200604 1 008 Pengatur Tk. I (II/d)		
29	Kecamatan Teweh Timur	Camat Kecamatan Teweh Timur	DONI KHAIRUL PERDANA, A.Md.AK NIP. 199807022022031001 Pengatur (II/c)		
30	Kecamatan Lahei	Camat Kecamatan Lahei	KARIADI NIP. 19810917 200801 1 012 Pengatur Tk.I (II/d)		
31	Kecamatan Gunung Timang	Camat Kecamatan Gunung Timang	MALISEI NIP. 19700725 200906 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)		
32	Kecamatan Montallat	Camat Kecamatan Montallat	BADRUN EFENDY NIP. 19671227 201212 1 001 Pengatur Muda (II/a)		
33	Kecamatan Gunung Purei	Camat Kecamatan Gunung Purei	EKO HERI SUTOPO NIP. 19750513 200604 1 004 Pengatur Tk. I (II/d)		

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
34	Kecamatan Teweh Baru	Camat Kecamatan Teweh Baru	NORMILADIYAH NIP. 19831026 201001 2 019 Pengatur Tk. I (II/d)		
35	Kecamatan Teweh Selatan	Camat Kecamatan Teweh Selatan	PAUJIAH NIP. 19840611 200901 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)		
36	Kecamatan Lahei Barat	Camat Kecamatan Lahei Barat	HIDAYAT TUSOLIHIN, S.Kom NIP. 19801030201001 1 005 Penata Tk. I (III/d)		
37	RSUD Muara Teweh	Direktur RSUD Muara Teweh	WIDIASTUTI ANJELINA, SKM NIP. 198709102009032005 Penata (III/c)		

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 4 /2023
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar	WATMIADI, A.Ma NIP. 19198102142014061002 Pengatur (II/c)	
		Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (P3NF)	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (P3NF)	CITRA EKA AGUSTINA, Amd NIP. 19890820 201503 2 005 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan Ketenagaan	AGUS RUZIKAN NIP. 19830817 201001 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
		Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	DPA Dinas Pendidikan Bidang Sarana dan Prasarana	NORDIANSYAH NIP. 19790702 200901 001 Pengatur Tk. I (II/d)	
2	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan	DPA Dinas Kesehatan (DAK FISIK)	LAILAN FEBRY ARIANI S, A.Md.AK NIP. 19930205 201503 2 004 Penata Muda (III/a)	
		Kabid Kesehatan Masyarakat	DPA Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	AYI SUNARSIH, SKM NIP. 19840520 200903 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	DPA Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	ARIF RAHMAN HAKIM, A.Md. Far. NIP. 19750111 200604 1 004 Penata Muda (III/a)	
		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DPA Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SRI INDRAYANI, S.Kep,Ns NIP. 19860509 201001 2 025 Penata Tk. I (III/d)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Bina Marga/Penandatanganan SPM	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	MERRY NOLISA, A.Md. NIP. 19740923 200701 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Kepala Bidang Tata Kota/Penandatanganan SPM	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	ANTON SUJARWADI NIP. 19770303 200701 1 017 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bidang Cipta Karya/Penandatanganan SPM	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 	DELTAYANA NIP. 197110102007012022 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bidang Tata Ruang/Penandatanganan SPM	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	YAYAT ULANTARI NIP. 19801015 200701 2 007 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bidang Sumber Daya Air/Penandatanganan SPM	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	RUSLINE NIP. 19740707 200701 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bidang Bina Kontruksi/ Penandatanganan SPM	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	OCTANI INDRIWATI NIP. 198010012008012018 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Balai Pengelolaan ALKAL/Penandatanganan SPM	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RUSMINIE NIP. 19780815 200901 2 001 Pengatur (II/d)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat /Penandatanganan SPM	Program/Sub Program : a Pengembangan Perumahan b Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh c Program Peningkatan prasarana,Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	AMANAH HERAYANTI, S.Sos NIP. 197810132010012017 Penata Tk. I (III/d)	
		Kepala Bidang Kawasan Permukiman/Penandatanganan SPM	Program Kawasan Permukiman	SOLEKAH NIP. 197206052007012027 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bidang Pertanahan /Penandatanganan SPM	DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Pertanahan	EDWIN YUDISTIRA, S.STP NIP. 19971010 201908 1 001 Penata Muda (III/a)	
5	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan	FITRIATUN NISA, S.Si NIP. 19831212 201403 2 001 Penata (III/c)	
		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	KHAIRIYAH, SKM NIP. 19860522 201001 2 023 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	NURUL MUSYAF'AH, S.AP NIP 19850317 201403 2 003 Penata Muda (III/a)	
		Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	RUSMALIAN SARI, AMG NIP. 19840831 201001 2 021 Penata (III/c)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Kepala Bidang Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	SAMSIR ALAMSYAH, S.KM NIP. 19690517 199303 1 012 Penata Tk. I (III/d)	
		Kepala Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kapasitas Kebudayaan	HADRIANTO, SE NIP. 19830808 200701 1 014 Penata (III/c)	
7	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum /Penandatangan SPM	Progam/Sub Progam a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	TORMIATI NIP. 19761224 200701 2 012 Pengatur (II/c)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Barang MiliK Daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan e. Administrasi Umum Perangkat <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi-SKPD f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 		

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
			<p>h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah <p>j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah 		

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
		Kepala Bagian Hukum /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum b. Fasilitasi Kerjasama Daerah - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	ENDANG HERAWATI NIP. 19751015 200101 2 018 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bagian Organisasi /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Penataan Organisasi - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	DESY ARIANI, A.Md. NIP. 19881214 201503 2 005 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Fasilitasi Penyusunan Progam Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Progam Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	FAHMI NAFIRI NIP. 19821113 200901 1 003 Pengatur Tk. I (II/d)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Pencapaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	ASHARI PERMADY S., A.Md. NIP. 19800405 201403 1 001 Penata Muda (III/a)	
		Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	INNA FARISKA, A.Md. NIP. 19810604 200604 2 012 Penata (III/c)	
		Kepala Bagian Pemerintahan /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Administrasi Tata Pemerintahan - Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	AGRARIA NIP. 19710106 200701 1 015 Penata Muda Tk. I (III/b)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan /Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi - Fasilitasi Keprotokolan - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	NURHAYATI NIP. 19800615 200901 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Penandatanganan SPM	Progam/Sub Progam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	JUPAR SIDIK, A.Md.AK NIP. 19980724 202203 1 002 Pengatur (II/c)	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DPA Badan PKAD Sekretariat BPKAD	MUHAMMAD MUJAHIDIN, SE NIP. 19760621 200701 1 018 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	DPA BPKAD Bidang Perbendaharaan Daerah	HADI CANDRA, SE NIP. 19770810 200701 1 015 Penata (III/c)	
		Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPA BPKAD Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	SRI SUGIARTI, SE NIP. 19770802 200801 2 020 Penata (III/c)	
		Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	DPA BPKAD Bidang Perencanaan Daerah	HENI ANDHIYATI, SE NIP. 19820430 201001 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	DPA BPKAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	ERNAWATI NIP. 19670706 200604 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
9	Kecamatan Teweh Tengah	Lurah Kelurahan Melayu/Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Teweh Tengah Dana Kelurahan Melayu	MUSJADI A. NIP. 198201032010011008 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Lurah Kelurahan Lanjas/Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Teweh Tengah Dana Kelurahan Lanjas	RAHMADI NIP. 19790115 200701 1 017 Penata Muda (III/a)	
10	Kecamatan Lahei	Lurah Kelurahan Lahei 1 /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Lahei Dana Kelurahan Lahei 1	WAHDAH, S.KM NIP. 19860118 201001 2 030 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Lurah Kelurahan Lahei 2 /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Lahei Dana Kelurahan Lahei 2	IPANSYAH, SE NIP. 198210282008011014 Penata Muda Tk. I (III/b)	
11	Kecamatan Montallat	Lurah Kelurahan Montallat 1 /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Montallat 1	HERMIANTONO,S.Pd NIP. 198601272010011013 Penata Tk. I (III/d)	
		Lurah Kelurahan Montallat 2 /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Montallat 2	MARGARETHA, A.Md NIP. 19790416 201001 2 019 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Lurah Kelurahan Tumpang Laung 1 /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Tumpang Laung 1	WILIONO, S.Pd NIP. 19791201 201406 1 001 Penata Muda (III/a)	
		Lurah Kelurahan Tumpang Laung 2 /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Tumpang Laung 2	ALFIANSYAH, S.Pd.SD NIP. 19710905 200701 1 014 Penata (III/c)	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	UNIT KERJA/KELOMPOK BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
12	Kecamatan Teweh Baru	Lurah Kelurahan Jambu /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Teweh Baru Dana Kelurahan Jambu	PEPEUWANTO, SE, M.IP NIP. 19860909 200501 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		Lurah Kelurahan Jingah /Penandatanganan SPM	DPA Kecamatan Teweh Baru Dana Kelurahan Jingah	MOHAMMAD CHANDRA, S.Tr.,Sos NIP. 19861217 201001 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH